

ABSTRAK

MARASUTAN SIREGAR

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUPA menetapkan bahwa bersumber dari hak menguasai Negara atas tanah ditentukan macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, serta badan-badan hukum.

Permasalahannya adalah pengaturan jual beli tanah yang dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, akibat hukum dari menjual tanah yang merupakan milik orang lain serta pertimbangan hakim atas tindakan memperjual belikan tanah milik orang lain dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 46 K/Pid/2022

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. "Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis.

Disimpulkan bahwa Pengaturan jual beli tanah yang dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, syarat Materil Sangat menentukan akan sahnya jual beli tanah tersebut, antara lain sebagai berikut; Pembeli berhak membeli tanah yang bersangkutan Maksudnya adalah pembeli sebagai penerima hak harus memenuhi syarat untuk membeli tanah yang akan dibelinya, akibat hukum dari menjual tanah yang merupakan milik orang lain dalam realitanya, tiap perbuatan (aksi) secara *de facto* selalu menimbulkan akibat (reaksi) dan hukum mau tidak mau terpaksa harus memperhitungkannya, dan kenyataannya memang juga begitu. Kalau perjanjian tidak sah, maka ada kalanya hukum menetapkan, apa yang telah diserahkan atas dasar perjanjian yang tidak sah itu dapat dituntut kembali dan kalau tindakan hukum itu menimbulkan kerugian pada pihak lain, maka hukum menetapkan bagi yang menderita rugi hak untuk menuntut ganti rugi. Pertimbangan hakim atas tindakan memperjual belikan tanah milik orang lain dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 46 K/Pid/2022 Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak. Bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Hukum Pidana, Jual Beli.

ABSTRACT

MARASUTAN SIREGAR

The provisions of Article 4 paragraph (1) UUPA stipulate that originating from the State's right to control over land are determined various rights to the surface of the earth called land, which can be given to and owned by people either alone or together with other people, and legal entities.

The problem is the regulation of buying and selling land which is justified in the applicable laws and regulations, the legal consequences of selling land that belongs to other people and the judge's consideration of the act of buying and selling land belonging to other people in the Supreme Court decision Number 46 K/Pid/2022

This research is descriptive with a normative juridical approach. "The normative juridical approach is emphasizing legal science with an emphasis on secondary data, to complete the data is done by collecting relevant materials and conducting literature studies where the data will then be analyzed juridically.

It is concluded that the land sale and purchase arrangements are justified in the applicable laws and regulations, the material requirements will determine the legality of the land sale and purchase, including the following; The buyer has the right to buy the land in question. This means that the buyer as the recipient of the right must meet the requirements to buy the land he is going to buy, the legal consequences of selling land that belongs to another person in reality, every *de facto* action (action) always causes a consequence (reaction) and Like it or not, the law is forced to take it into account, and in fact it is the same. If the agreement is invalid, then there are times when the law stipulates, what has been handed over on the basis of the invalid agreement can be claimed again and if the legal action causes loss to the other party, then the law determines that the person who has suffered a loss has the right to claim compensation. The judge's consideration of the act of buying and selling land belonging to other people in the Supreme Court decision Number 46 K/Pid/2022 Based on the above considerations, the Cassation Petitioner/Public Prosecutor cannot prove that the *judex facti* decision does not comply with the provisions of Article 253 Paragraph (1) of the Law -Law No. 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Code. Thus, based on Article 254 of Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Code, the appeal from the Public Prosecutor was rejected. Whereas because the Defendant was acquitted, the costs of the case at all levels of the judiciary and at the cassation level were borne by the State.

Keywords: Responsibility, Criminal Law, Buying and Selling.